

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan terbaru terkait kebijakan *work from Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 secara resmi diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dua sistem kerja yaitu *work from office* (WFO) dan *work from Home* (WFH). Kebijakan ini diambil pemerintah dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Maret 2026 dan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 28 Maret 2026, hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 15 Maret 2026, serta hasil Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 23 Maret 2026 dan 28 Maret 2026, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026).

Perubahan pada pola kerja yang terjadi pada birokrasi mendapat momentum besar pada masa pandemi Covid-19 ketika banyaknya instansi pemerintah menerapkan sistem kerja jarak jauh sebagai salah satu bagian dari penyesuaian organisasi. Meredanya masa pandemi, praktik kerja fleksibel tidak ditinggalkan sepenuhnya, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari agenda modernisasi birokrasi, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan penguatan

budaya kerja berbasis hasil. Laporan dari *International Labour Organization* (ILO) menyebutkan bahwa kerja jarak jauh telah menjadi salah satu bagian penting dari transformasi dunia kerja global dan berimplikasi pada cara organisasi mengelola produktivitas, pengawasan, dan kesejahteraan pekerja (*International Labour Organization*, 2021).

Istilah *Work from home* (WFH) dan *Work From AnyWhere* (WFA) memiliki perbedaan dalam pemaknaannya. *Work from anyWhere* merupakan sistem kerja yang bisa dilakukan dari mana saja, dengan adanya sistem kerja ini tidak membatasi karyawan untuk bekerja di kantor secara *Work From Office* (WFO) ataupun bekerja dari rumah secara *Work Frome Home* (WFH). Karyawan dapat bebas memilih tempat kerjanya namun yang terpenting pada penerapan sistem WFA yaitu mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan pemaknaan dalam *Work from home* (WFH) adalah bekerja dari rumah.

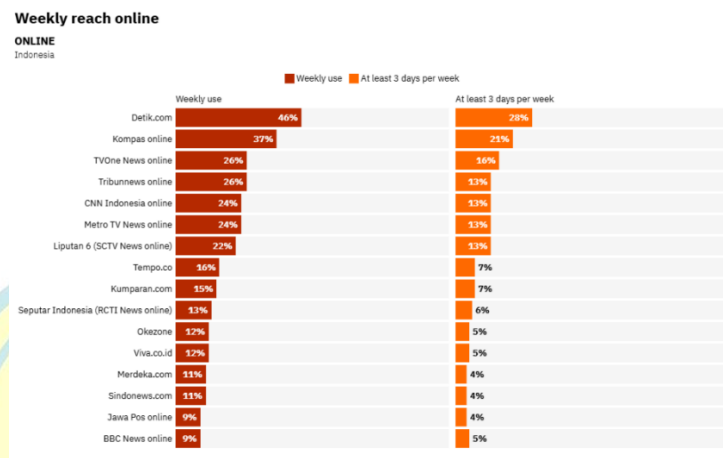
Kebijakan *Work From Home* yang diberlakukan bagi ASN ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2026 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2026, Kebijakan ini tertulis dan berstatus berlaku dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup kebijakan tersebut berlaku bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, yang dimaksud sebagai Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan kebijakan *Work From Home* mencakup ruang lingkup dari Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah merupakan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota.

Intelligentia - Dignitas

Gambar 1. 1
Jangkauan Mingguan Media Online di Indonesia

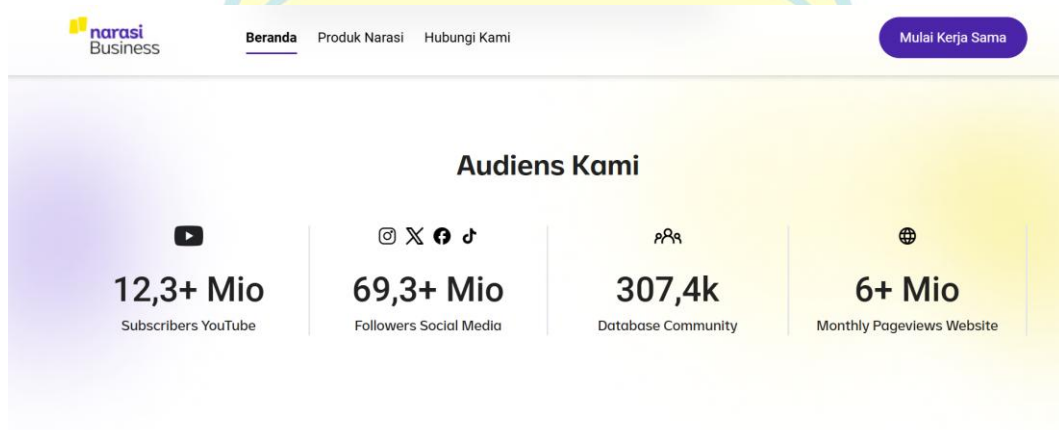


Sumber: *Reuters Institute for the Study of Journalism* 2026 (Diambil pada 5 Maret 2026)

Kompas.com salah satu media yang sudah lama ada di Indonesia yang sudah memberitakan isu secara berkala. Data *Reuters Institute Digital News Report* tahun 2025 menunjukkan bahwa Kompas.com menjadi salah satu media dengan jangkauan mingguan (*weekly reach*) tertinggi di Indonesia mencapai 37% (*Reuters Institute Digital News Report* 2025). Kompas.com merupakan salah satu media online terkemuka di Indonesia yang menyajikan berita populer. Sejak didirikan pada tahun 1995, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Kehadiran platform digital ini berawal dari tantangan mendistribusikan Harian Kompas secara fisik ke berbagai daerah, terutama karena kendala geografis yang menghambat akses informasi, termasuk untuk masyarakat di luar negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 18 Desember 1995, domain *kompas.com* didaftarkan guna mempermudah akses berita secara global dan di awal tahun 1996 Kompas mulai beroperasi dengan nama *Kompas.co.id*, dengan alamat situs

www.kompas.com. Pada tahun 1998, media ini bernaung di bawah PT Kompas Cyber Media, dan pada tahun 2008, melalui proses rebranding, secara resmi menjadi Kompas.com.

Gambar 1. 2
Jumlah Audiens Narasi.Tv



Sumber: [Narasi.Tv](https://narasi.tv) 2026 (Diambil pada 15 Maret 2026)

Narasi TV merupakan portal berita dan ekosistem media digital daring yang dikelola oleh PT Narasi Media Kita. Diluncurkan pada tahun 2018 oleh Najwa Shihab beserta beberapa tokoh jurnalisme terkemuka, media ini memiliki reputasi kuat sebagai salah satu sumber informasi yang kritis, independen, dan objektif di Indonesia. Sebagai salah satu pelopor *homeless media* terkemuka di tanah air, Narasi TV dapat bersaing dengan media-media lain dan tidak bergantung pada satu situs web tunggal milik sendiri, melainkan mendistribusikan konten jurnalisme investigasi dan analisis mendalamnya secara multiplatform melalui ekosistem media sosial lain seperti YouTube, Instagram dan TikTok guna menjangkau generasi muda secara masif. Keunggulan Narasi TV terletak pada

kekuatan visual, infografis interaktif, serta kemampuan riset berbasis data yang tajam melingkupi berbagai format multimedia. Pendekatan jurnalisme berbasis data digital dan independensinya dari konglomerasi media konvensional menjadikan Narasi TV sebagai representasi media alternatif yang ideal dalam mengonstruksi serta mengawal kebijakan publik secara kritis. (Diah Puspita Sari & Sumartono, 2026).

Pemberitaan pada kebijakan tersebut mempertemukan tiga unsur, kebijakan publik, media digital, dan persepsi masyarakat terhadap birokrasi. Isu yang berkaitan dengan ASN dapat memiliki pandangan sensitivitas sosial yang tinggi, karena aparatur negara dipandang sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Feby Jolanda Olivia & Hendra Setiawan, 2023). Ketika kebijakan mengenai sistem kerja ASN diberitakan oleh media, yang hadir di ruang publik bukan hanya informasi administratif, tetapi juga terjadi makna-makna sosial yang dibangun melalui konstruksi media. Media massa memiliki peran yang penting dalam menyebarluaskan sebuah informasi yang sekaligus dapat memengaruhi agenda publik dengan menentukan isu apa yang dianggap penting (Zulkifli Hidayat et al., 2024).

Arah kebijakan pada birokrasi di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menempatkan transformasi digital, penyederhanaan proses kerja, dan penguatan sistem kerja ASN yang adaptif sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026). Kebijakan mengenai WFH bagi ASN dapat dikatakan sebagai salah satu

bagian dari proses perubahan dalam manajemen birokrasi Indonesia yang lebih luas, bukan sekadar pengaturan kehadiran kerja.

Kebijakan yang berkaitan dengan sistem kerja atau fleksibilitas kerja ASN memunculkan berbagai respons yang beragam di masyarakat. Pada satu sisi WFH dapat dipahami sebagai bentuk inovasi kerja yang dapat mendorong efisiensi, penghematan waktu, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan keseimbangan kerja dan kehidupan pegawai. Pada sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat diartikan sebagai ancaman terhadap kualitas pelayanan tatap muka, efektivitas pengawasan, dan kedisiplinan aparatur, terutama jika tidak disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang kuat (Fadila et al., 2024). Respon pada masyarakat tersebut dapat dijelaskan bahwa media seringkali membingkai kebijakan pemerintah dengan menonjolkan aspek kepentingan atau efektivitas di satu media, pada media lain dapat lebih menekankan pada kendala teknis dan dampaknya terhadap Masyarakat (Wilda Hikmalia et al., 2022). Ketidakyakinan publik terhadap efektivitas kebijakan tersebut dapat dipicu oleh bagaimana sebuah media melakukan konstruksi pesan yang dapat memengaruhi persepsi dari khalayak (Syamin Sofea Saifullizam et al., 2025).

Pemilihan portal berita Kompas.com dan Narasi.tv sebagai objek penelitian didasarkan pada posisi keduanya yang memiliki kredibilitas, jangkauan luas, serta pengaruh besar dalam ekosistem media Indonesia. Meskipun sama-sama berpengaruh, kedua media ini memiliki karakteristik redaksional yang kontras. Kompas.com mewakili institusi media arus utama konvensional dengan tradisi jurnalistik yang mapan, sementara Narasi.tv hadir sebagai *homeless media*

berbasis platform digital yang dikenal lebih independen, kritis, dan adaptif terhadap interaksi komunitas digital. Perbedaan karakter redaksional ini memungkinkan munculnya perbedaan pembedaan (*framing*) dalam memberitakan isu kebijakan birokrasi, mengingat setiap media memiliki gaya kepemimpinan redaksi dan orientasi ideologis yang berbeda (Feby Jolanda Olivia & Hendra Setiawan, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga secara aktif menentukan agenda publik melalui pemilihan isu yang dianggap penting bagi khalayak (Zulkifli Hidayat et al., 2024). Dengan demikian, membandingkan kedua media ini bertujuan untuk melihat bagaimana konstruksi pesan yang berbeda dapat memengaruhi persepsi serta evaluasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Syamin Sofea Saifullizam et al., 2025).



Intelligentia - Dignitas

Perbedaan persepsi masyarakat yang terjadi memperlihatkan bahwa makna suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi dari kebijakan itu sendiri, cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik juga sangat menentukan. Ini dapat terjadi karena media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah peristiwa yang mengarahkan sudut pandang pembaca (Muhammad Nabil Hafidli et al., 2023). Melalui pemilihan isu, media dapat menonjolkan aspek kepatuhan atau pelanggaran yang akhirnya membentuk pemaknaan tertentu di mata masyarakat (Ja'is & Andhita Risko Faristiana, 2024). Konstruksi pesan yang dilakukan dalam berita menjadi penentu utama dari sebuah kebijakan yang akan diterima sebagai solusi inovatif atau dianggap sebagai masalah baru oleh masyarakat (Oktami Pangestu & Amin Shabana, 2024).

Pada masa sekarang konektivitas internet dan media online menjadi sangat relevan bagi masyarakat karena kecepatan penyebaran informasinya. Keunggulan media online dalam menjangkau audiens melampaui surat kabar, sehingga sangat potensial untuk penyebaran berita politik. Media menerapkan strategi pemberitaan spesifik untuk menyoroti afiliasi politiknya, termasuk pemilihan objek berita, narasumber, jenis jurnalisme, dan gaya penulisan *Lead* berita, dijelaskan melalui konsep *framing* yang memandang berita sebagai hasil konstruksi atas realitas melalui seleksi, penekanan, dan penyusunan fakta tertentu (Anisah Nurrasyid Siregar et al., 2022). Pemahaman dari masyarakat terhadap suatu isu sangat bergantung pada bagaimana media mengemas informasi tersebut menjadi sebuah realitas yang bermakna bagi audiens (Wilda Hikmalia et al., 2022).

Media online memiliki sebuah cara untuk membingkai peristiwa atau isu spesifik melalui laporan yang disajikannya guna mengkonstruksi realitas di mata pembaca (Anisah Nurrasyid Siregar et al., 2022). Cara pemberitaan yang dibingkai ini berpotensi membentuk opini dan pandangan publik mengenai kebijakan *Work From Home* bagi ASN melalui seleksi informasi dan penekanan aspek tertentu dalam teks berita. Pengguna media juga menjadi aspek penentu dalam pembentukan dan distribusi konten yang akan menentukan sebuah kebijakan dipandang sebagai langkah yang berguna atau justru dapat memicu perdebatan di masyarakat (Ismoko Widyaya & Wiji Setiawan, 2023).

Sebagai dua institusi media yang memiliki reputasi besar, pola pemberitaan yang disajikan oleh Kompas.com dan Narasi.tv menjadi sorotan bagi publik dalam memahami isu-isu kompleks, termasuk isu pemberitaan *Work From Home* bagi ASN. Peran kedua media ini sangat berpengaruh dalam membentuk dan menyajikan pesan kepada publik, di mana masing-masing media memiliki kecenderungan tersendiri dalam mengemas fakta guna membangun kepentingan atau pemikiran tertentu di benak audiensnya (Zulkifli Hidayat et al., 2024). Perbedaan pada kedua media tersebut, peneliti memutuskan untuk menjadikan Narasi.tv dan Kompas.com menjadi objek penelitian dari penelitian ini. Berita-berita yang dijadikan subjek penelitian ini terkait dengan berita mengenai kebijakan *Work From Home* bagi ASN dilihat dari 3 fase kebijakan April 2026.

Untuk berita yang dipilih yaitu pemberitaan mengenai WFH bagi ASN pada tahun 2026 dari kedua media tersebut. Kriteria berita yang dipilih oleh peneliti seperti pemberitaan yang di dalamnya terdapat struktur-struktur dari

Model *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki meliputi struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pemberitaan yang dipilih mencakup pada tiga fase, pertama pemberitaan sebelum kebijakan atau sebelum Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini dibuat, fase kedua mengenai pemberitaan setelah surat edaran Menteri tersebut dibuat yaitu pada tanggal 30 Maret 2026, dan fase ketiga pada pemberitaan setelah surat edaran atau kebijakan tersebut berstatus berlaku yaitu pada tanggal 1 April 2026.

Untuk alur pemelihan berita yang dilakukan pertama adalah mencari berita di kedua media terkait kata kunci dari kebijakan yaitu WFH dan mengumpulkan berita sesuai periode yang ditentukan, setelah pengumpulan, pemilihan ketentuan kriteria berita dipilih. Isi pemberitaan harus merujuk pada surat edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 dan terdapat 4 struktur dari *framing* Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki, berita yang terdapat pengulangan tidak akan dimasukan kedalam salah satu berita yang akan dipilih. Pengumpulan ini secara *Purposive Sampling* bukan secara acak guna mendapatkan hasil yang sesuai dan jelas.

Berita-berita yang dipublikasi oleh Narasi.tv terkait dengan pemberitaan *Work From Home* bagi ASN yaitu sebanyak 4 berita dari kriteria waktu penelitian 13 Maret-1 April 2026. Sedangkan berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com tentang pemberitaan *Work From Home* bagi ASN dari tanggal 13 Maret-1 April 2026 ditemukan sebanyak 171 hasil dari pencarian kebijakan “WFH”. Penulis

memilih 3 berita yang dijadikan bahan penelitian untuk dilihat bagaimana *framing* yang dilakukan pada pemberitaan tersebut yang mencerminkan 3 fase kebijakan tersebut.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pemberitaan yang terkait kebijakan WFH bagi ASN pada portal berita Narasi.tv dan Kompas.com dalam 3 fase tersebut. Fase awal kemunculan isu pada 13 Maret 2026 yang merupakan tanggal Sidang Kabinet Paripurna yang menjadi titik awal wacana kebijakan ini muncul ke publik, yaitu sebelum aturan kebijakan ditetapkan dan diberlakukan, fase kedua kebijakan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026 dan fase 3 saat kebijakan diberlakukan pada tanggal 1 April 2026. Fase ini dipilih untuk melihat perbedaan dalam pembentukan persepsi publik. Pada fase ini media akan cenderung aktif menetapkan definisi masalah, memilih aktor utama yang disorot, menonjolkan konsekuensi kebijakan, serta membentuk konteks interpretasi yang akan memengaruhi pembacaan publik terhadap isu pada tahap selanjutnya (Muhammad Nabil Hafidli et al., 2023).

Penelitian terdahulu mengenai analisis *framing* terkait kebijakan pemerintah telah dilakukan sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Qonitah et al., 2025) dengan judul penelitian “Analisis *Framing* Pan dan Kosicki Pemberitaan Kebijakan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Tahun 2024 di Kompas.com dan Tempo.co”, penelitian ini menunjukkan media massa yang secara aktif membangun realitas sosial melalui pembedaan yang berbeda sesuai dengan ideologi medianya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Kompas.com cenderung membingkai kebijakan tersebut secara legal formal

dengan penekanan pada aspek perlindungan hukum, sementara pada Tempo.co mengonstruksi isu secara lebih kritis-reflektif dengan menyoroti kompleksitas sosial serta risiko implementasi kebijakan di lapangan. Hasil *framing* pada media juga sering kali menyoroti beberapa aspek seperti kesiapan dan efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

Temuan-temuan tersebut menguatkan bahwa *framing* media merupakan wilayah kajian yang penting untuk melihat pola konstruksi realitas dalam teks berita, terutama pada kebijakan yang berdampak luas bagi aparatur negara. Penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Narasi.tv dan Kompas.com membingkai kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026, guna melihat apakah terdapat perbedaan ideologi dari kedua media tersebut, pola penekanan isu atau perbedaan aktor narasumber yang ditonjolkan oleh kedua media tersebut.

Penelitian *framing* telah banyak digunakan untuk mengkaji isu politik, pemilu, konflik sosial, dan kebijakan nasional, tetapi belum terdapat penelitian terbaru yang membandingkan *framing* media online terhadap kebijakan terbaru pemerintah mengenai WFH bagi ASN dalam periode awal kemunculan isu ini dan dalam 3 fase. Hal itu menjadi letak kebaruan penelitian ini, yaitu pada fokus isu, objek media, dan rentang waktu analisis yang spesifik.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana media online mengonstruksi makna atas kebijakan WFH bagi ASN dalam 3 fase. Dengan menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana portal berita Narasi.tv dan Kompas menyusun realitas

melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada kajian komunikasi massa dan media digital, serta kontribusi praktis pada pemahaman komunikasi kebijakan birokrasi di Indonesia.

Proses pembingkaihan (*framing*) selalu menyertai setiap pemberitaan media, yang analisisnya digunakan untuk menelaah bagaimana sebuah media mengkonstruksi narasi berita bagi publik. Mencakup tahapan penyusunan, pengisahan, penulisan, penekanan, serta pengungkapan pemahaman wartawan terhadap suatu peristiwa, di mana setiap media memiliki pendekatan *framing* nya masing-masing (Simatupang, 2021). *Framing* menjadi aspek yang cukup penting dalam dunia jurnalistik, utamanya saat melaporkan isu kontroversial yang memicu berbagai perspektif dan kepentingan kelompok masyarakat. Kualitas bahasa jurnalistik yang baik tercermin dari kepadatan kalimat, ketepatan diksi, dan struktur kalimat yang kohesif (M. Abdullah Munif, 2023).

Analisis *framing* dapat sesuai ketika digunakan untuk meneliti pemberitaan kebijakan publik, termasuk kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam pemberitaan kebijakan, media dapat menempatkan isu sebagai solusi, masalah, inovasi, kontroversi, atau bahkan ancaman, tergantung pada bagaimana peristiwa tersebut dikemas dalam teks berita. *Framing* semacam ini sangat menentukan cara masyarakat menilai kebijakan dan aktor yang terlibat di dalamnya (Mey Esa Dwi Vanti et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, *framing* pada model ini dapat ditelusuri melalui empat struktur utama,

yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Struktur sintaksis mencakup penyusunan *Headline*, *Lead*, dan kutipan sumber, struktur skrip melihat pola penceritaan melalui unsur 5W dan 1H, struktur tematik menelaah pengorganisasian ide dan fokus isu, sedangkan struktur retorik menelaah pilihan kata, metafora, dan bentuk penekanan tertentu dalam berita (Pan & Kosicki, 1993).

Model ini relevan digunakan pada media online karena berita digital sangat bergantung pada kekuatan judul, *Lead* dan penempatan informasi awal yang cepat dibaca oleh khalayak. Konsumsi berita digital dalam dunia yang nyata, pembaca sering kali membangun kesan awal terhadap isu hanya dari judul, cuplikan berita, dan paragraf pembuka. Analisis *framing* yang dilakukan pada teks berita online dapat mengungkap bagaimana media secara efektif membangun realitas dan mengarahkan pembacaan publik atas suatu kebijakan. Melalui penonjolan aspek masalah yang spesifik, media digital memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi khalayak secara luas terhadap fenomena yang sedang diberitakan (Zulkifli Hidayat et al., 2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada upaya untuk memahami bagaimana perbedaan karakter redaksional antara media Kompas.com dan Narasi.tv dapat memengaruhi cara kedua media tersebut dalam membingkai suatu kebijakan atau pemberitaan yang sama. Melalui analisis *framing* yang dilakukan pada pemberitaan media, peneliti ingin melihat sejauh mana karakteristik unik,

ideologi, serta gaya penyajian dari masing-masing ruang redaksi mengonstruksi realitas dari isu kebijakan yang diangkat, sehingga menghasilkan sudut pandang pembedaan (*framing*) yang berbeda di mata masyarakat.

1.3 Keunikan Penelitian

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki keunikan yaitu fokus penelitian pada pemberitaan mengenai analisis *framing* pada kebijakan *Work From Home* bagi ASN Indonesia tahun 2026 pada media berita Narasi.tv dan Kompas.com. Hingga penelitian ini dibuat, belum ada penelitian yang fokusnya membahas analisis *framing* pada kebijakan *Work From Home* bagi ASN Indonesia tahun 2026 pada media berita Narasi.tv dan Kompas.com dengan menggunakan model analisis *Framing* Zhongdang Pan, Gerald M. Kosicki.

1.4 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian pada beberapa aspek utama. Subjek penelitian ini dibatasi pada teks berita yang dipublikasikan oleh portal berita online Narasi.tv dan Kompas.com terkait pemberitaan mengenai kebijakan *Work From Home* bagi Aparatur Sipil Negara yang mulai dari sebelum pemberlakuan dan penetapan kebijakan, setelah penetapan kebijakan dan setelah pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemilihan kedua media ini didasarkan pada kredibilitas dan jangkauan audiens yang luas dalam ekosistem media digital di Indonesia. Objek penelitian difokuskan secara khusus pada portal berita online Narasi.tv dan Kompas.com. Peneliti juga membatasi jumlah pada pemberitaan yang akan dianalisis dengan jumlah tiga pemberitaan pada masing-masing portal media.

Peneliti mengambil tiga pemberitaan dari masing-masing media dengan tujuan untuk membatasi penelitian ini agar tetap fokus pada topik yang ingin dibawakan oleh peneliti. Tiga berita yang digunakan peneliti ini merepresentasikan bagaimana media online melakukan pemberitaan dari kebijakan *Work From Home* bagi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2026 dilihat dari 3 fase. Hal tersebut tergantung dari setiap media melakukan pemberitaan dari sudut pandang tertentu.

Periode pengamatan dibatasi pada fase awal kemunculan isu pada 13 Maret 2026 yang merupakan tanggal Sidang Kabinet Paripurna yang menjadi titik awal wacana kebijakan ini muncul ke publik, yaitu sebelum aturan kebijakan ditetapkan dan diberlakukan, fase kedua kebijakan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026 dan fase 3 saat kebijakan diberlakukan pada tanggal 1 April 2026. Pembatasan waktu ini dilakukan untuk melihat perubahan *framing* pada kedua media. Analisis yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini digunakan untuk membedah konstruksi realitas dalam teks berita melalui empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan gaya pembedaan antara Narasi.tv dan Kompas.com dalam menyajikan isu birokrasi tersebut.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana portal berita Narasi.tv dan Kompas.com membingkai pemberitaan kebijakan *Work From Home* bagi Aparatur Sipil Negara pada tiga fase kebijakan melalui empat struktur *Framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki?

1.6 Fokus Penelitian

Peneliti akan berfokus tentang analisis *framing* pada media online dalam pemberitaan kebijakan *Work From Home* bagi Aparatur Sipil Negara Indonesia tahun 2026 pada media berita Narasi.tv dan Kompas.com, peneliti menggunakan teori analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menuliskan fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana Analisis *Framing* Media Online Pada Pemberitaan kebijakan *Work From Home* bagi ASN Indonesia tahun 2026 pada media berita Narasi.tv dan Kompas.com.

1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *framing* media online dalam pemberitaan *Work From Home* (WFH) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada portal berita Narasi.tv dan Kompas.com pada tahun 2026.

1.8 Manfaat Penelitian

1.8.1 Manfaat Penelitian Akademis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam praktik jurnalisme yang dikelola dengan media melalui pendekatan analisis

framing dan juga sebagai pengembang dari penelitian yang sebelumnya dan juga perbandingan bagi penelitian yang serupa.

1.8.2 Manfaat Penelitian Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat agar bisa lebih memahami *framing* yang dilakukan oleh media dalam pemberitaan terkait kebijakan *Work From Home* bagi ASN Indonesia tahun 2026, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk jurnalis, praktisi media, dan juga pengamat lembaga.

